

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

KBRI Kuala Lumpur adalah perpanjangan dari pemerintah Indonesia yang menjadi perwakilan Indonesia di Malaysia yang mengurus pembentukan sanggar bimbingan yang menjadi salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh KBRI Kuala Lumpur guna untuk meningkatkan akses Pendidikan dasar bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada wilayah Malaysia. Program kerja sanggar bimbingan ini dalam menjalankan kinerjanya di bantu juga oleh Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai kepala koordinator kurikulum.

SB yang di dirikan KBRI Kuala Lumpur ini menyediakan beasiswa yang bisa di peruntukan oleh siswa-siswi yang mengenyam Pendidikan di semua Lembaga Pendidikan Indonesia yang berada di Malaysia, beasiswa ini di bagi menjadi dua yaitu ADEM dan ADIK yang di mana beasiswa tersebut merupakan beasiswa yang bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia khususnya KEMENDIKBUD Republik Indonesia.

Dalam mendukung kinerja KBRI dalam memenuhi hak-hak anak PMI di Malaysia, Kedutaan melayani penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) yang di terbitkan konsuler yang berguna untuk menjadi syar dokumen pendukung untuk membuat paspor dan mendaftar di Lembaga Pendidikan Indonesia yang berada di Malaysia baik itu sanggar bimbingan ataupun Lembaga Pendidikan lainnya.

Akan tetapi KBRI Kuala Lumpur dalam menjalankan tugasnya sebagai kantor perwakilan yang menjadi pelopor terbentuknya sanggar bimbingan yang ada di wilayah Malaysia. Mengalami beberapa kendala yang dihadapi, kendala terbesar yang dihadapi oleh KBRI Kuala Lumpur ialah perizinan pembentukan SB yang ada di Malaysia karena sampai dengan saat ini pemerintah Malaysia masih belum memberikan izin secara resmi kepada setiap sanggar bimbingan khususnya yang berada di wilayah semenanjung Malaysia.

KBRI Kuala Lumpur sendiri telah melakukan berbagai koordinasi dan diplomasi baik itu dengan pemerintah Malaysia maupun pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan legalitas tersebut, antara lain dengan cara melobi Kementerian Pendidikan dari kedua negara guna untuk mendiskusikan bagaimana agar sanggar bimbingan bisa legal secara hukum dan setiap sanggar bimbingan bisa dengan leluasa menjalankan setiap kegiatan dan pembelajaran.

5.2. Saran

Terakhir dalam penelitian ini , peneliti akan memberikan beberapa saran yang dapat di pergunakan untuk kudepanya antara lain:

Ke depannya diharapkan pemerintah Indonesia yang berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia agar lebih memperhatikan anak-anak warga negara Indonesia di Malaysia khususnya para PMI yang menetap di Malaysia agar bisa mendapatkan akses Pendidikan dasar yang layak dengan cara memfasilitasi anak-anak tersebut untuk dapat belajar di setiap sanggar bimbingan dan pemerintah Indonesia juga bisa memberikan fasilitas yang

memadai untuk menunjang setiap pembelajaran yang dilakukan oleh sanggar bimbingan. Sebagaimana yang tertuang pada undang-undang yang mewajibkan setiap anak mengenyam Pendidikan minimal 12 tahun. dan pemerintah Indonesia juga bisa lebih berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia terkait dengan pembentukan sanggar bimbingan yang berada di wilayah Malaysia . dan harapannya juga banyak dari Perusahaan swasta ataupun Lembaga di Indonesia untuk bisa mempertimbangkan Kerja sama dan menyalurkan dana CSR-nya kepada sanggar bimbingan agar bisa dipergunakan untuk menjalankan sanggar bimbingan dengan baik.

Bagi mahasiswa yang tertarik meneliti tema yang sama, peneliti memiliki saran untuk meneliti tentang Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar di Malaysia, agar dalam meneliti tema ini bisa untuk menyisihkan waktu lebih Panjang untuk studi lapangannya karena banyaknya sanggar bimbingan yang tersebar di seluruh wilayah Malaysia .